

**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN NAGARI AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2018**



**NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) Akhir Tahun Anggaran 2018 atas Pelaksanaan APBNagari Tahun Anggaran 2018, Saya mengajak kita sekalian untuk menundukkan kepala, seraya mengangkat hati dan menaikkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas Karunia, Hidayah dan nikmat kesehatan dari-Nya jualah kita dapat berkumpul dalam Forum yang terhormat ini.

Saya atas nama Pemerintahan Nagari Lunang Tiga, menyampaikan ucapan terima kasih kepada para undangan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di kantor Nagari Lunang Tiga guna memenuhi undangan Kami.

Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) Nagari Lunang Tiga Akhir Tahun Anggaran 2018 kepada masyarakat Nagari Lunang Tiga melalui Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) Lunang Tiga ini, merupakan kewajiban Kami selaku Pejabat Wali Nagari Lunang Tiga dalam rangka transparansi Pemerintah Nagari selama Tahun Anggaran 2018 serta merupakan bagian dari mekanisme dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas - tugas pokok dan fungsi Pemerintah Nagari meliputi pelaksanaan tugas - tugas umum Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Pelayanan serta Pemberdayaan Masyarakat selama kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2018.

Di samping itu, LKPPN ini disampaikan untuk memenuhi kewajiban kepada Wali Nagari untuk menyampaikan LKPPN paling lambat akhir Bulan Maret 2018, Sambutan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari materi dan lampiran LKPPN dan selanjutnya akan kami serahkan kepada BAMUS Nagari Lunang Tiga, Bapak Camat Lunang dan Bapak Bupati Pesisir Selatan.

Hasil - hasil penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pelayanan serta Pemberdayaan Masyarakat selama kurun waktu Tahun 2018, akan kita cermati bersama dalam penjelasan selanjutnya. Pada dasarnya hasil - hasil yang telah dicapai oleh Pemerintahan Nagari bersama Masyarakat Nagari Lunang Tiga selama Tahun 2018 merupakan akumulasi dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dari tahun - tahun sebelumnya dan mekanisme pelaksanaannya menggunakan Rencana Pembangunan Tahunan Nagari yang merujuk pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNagari) yang dilakukan secara Partisipatif, Sinergis, Koordinatif, Transparan, Akuntabel dan berkelanjutan melalui pemanfaatan Potensi, Peluang, serta melihat Kelemahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan.

Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) Nagari Lunang Tiga Akhir Tahun Anggaran 2018 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) yang merupakan lembaga permusyawaratan Nagari tentang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Lunang Tiga selama kurun waktu satu tahun, yaitu dari Januari sampai dengan Desember 2018. Penting disadari bahwa hasil yang dicapai merupakan kerja keras semua pihak, baik Pemerintahan Nagari Lunang Tiga maupun seluruh komponen pembangunan yang ada di Nagari

Lunang Tiga, sementara itu yang belum berhasil dilihat sebagai tantangan untuk diatasi di masa yang akan Datang.

Semangat Otonomi Nagari tercermin dengan upaya Pemerintahan Nagari mengatur dan mengurus rumah tangga Nagari dengan asas musyawarah dan mufakat serta mengedepankan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam membangun Nagari. Pungutan Nagari yang dikenakan kepada masyarakat pada dasarnya wujud dari keikutsertaan masyarakat dalam membiayai pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Nagari.

Tak lupa kami sampaikan banyak terimakasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Lunang Tiga Akhir Tahun Anggaran 2018. Baik dari Pemerintah Kabupaten, kecamatan, Perangkat Nagari Lunang Tiga.

Tiada gading yang tak retak begitu pula selama Saya beserta Aparat Pemerintah Nagari dalam melaksanakan tugas tentunya tak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, dan kami mohon agar dibukakan pintu maaf dan selanjutnya mari kita membangun Nagari dengan semangat kebersamaan.

Mengakhiri Laporan ini, kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota BAMUS Nagari Lunang Tiga yang telah bermusyawarah dan bekerja sama selama ini, semoga apa yang telah kita buat bersama akan membawa Nagari kita meraih kemajuan yang lebih baik di masa yang akan datang dan memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat Nagari Lunang Tiga.

Lunang Tiga, 15 Maret 2019
Wali Nagari Lunang Tiga



M. SOBIRIN, SH

DAFTAR ISI

SAMPUL	
PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
I. PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUJUAN	2
C. DASAR HUKUM	3
II. KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERATURAN NAGARI	
A. PERATURAN NAGARI TENTANG APB NAGARI.....	4
B. PERATURAN NAGARI TENTANG PUNGUTAN NAGARI	6
III. PENUTUP	
A. KESIMPULAN	7
B. SARAN	7

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. *Rincian Anggaran Pendapatan Nagari Tahun 2018*
2. *Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2018*
3. *Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2018*
4. *Rincian Realisasi Kegiatan Dana PAN*
5. *Rincian Realisasi Kegiatan Dana ADD*
6. *Rincian Realisasi Kegiatan Dana DDS*
7. *Rincian Realisasi Kegiatan Dana PBH*
8. *Rincian Realisasi Kegiatan Dana PBK*
9. *Rincian Realisasi Kegiatan Dana DLL*
10. *Laporan Semester II*
11. *Laporan Kekayaan Nagari*
12. *Laporan PMK 225*
13. *Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada akhir bulan Desember 2018.*

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Nagari Lunang Tiga adalah salah satu Nagari yang terletak di Kecamatan Lunang yang berada dibagian Selatan Kabupaten Pesisir Selatan. Jarak tempuh wilayah Nagari Lunang Tiga dari Ibukota Kabupaten Pesisir Selatan 200± km. Nagari ini memiliki luas wilayah 17,72 km², dengan potensi lahan yang produktif diantaranya, perkebunan.

Jarak Kecamatan 12 Km
Lama tempuh kecamatan 30 Menit
Jarak Kabupaten 200 Km
Lama tempu Kabupaten 4 jam

Adapun batas-batas Nagari sebagai berikut :

Sebelah Utara : Nagari Lunang Dua
Sebelah Timur : Nagari Lunang Barat
Sebelah Selatan: Nagari Sindang Lunang
Sebelah Barat : Nagari Lunang

Pusat pemerintahan Nagari Lunang Tiga terletak di Kampung Marga Mulya dan untuk menuju Kantor Nagari dapat dijangkau dengan kendaraan umum atau jalan kaki karena berada di jalan poros Nagari yang telah di aspal, berhubungan langsung dengan pusat kota Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara administratif Nagari Lunang Tiga terbagi atas 3 Kampung yaitu :

Kampung Marga Mulya terdiri dari 5 RT
Kampung Tanjung Mulya terdiri dari 5 RT
Kampung Ujung Jaya terdiri dari 5 RT

Pengadaan sarana prasarana yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Lunang Tiga menggunakan Dana Desa tahun 2018, sebesar Rp. 672.617.000,00. Semua Dana Desa digelontorkan keprogram pembangunan dan Pemberdayaan tersebut.

Selain program pembangunan, Pemerintah Nagari telah melaksanakan program kebutuhan masyarakat berdasarkan perencanaan yang dituangkan dalam RKP Nagari dan APBNagari tahun 2018. Diantaranya program pemenuhan kebutuhan dasar dibidang pendidikan dan keagamaan. Langkah konkritnya adalah pemberian bantuan honor guru dan peralatan, memfasilitasi kegiatan majelis taklim Nagari Lunang Tiga dan memfasilitasi bakti sosial yang dilakukan sekali sepekan.

Adapun keberhasilan dan kemajuan Nagari Lunang Tiga tahun 2018, maka diuraikan dalam bentuk tabel dibawa ini sebagai indikator pembeda dari tahun sebelumnya.

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI
1	BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN NAGARI	1. Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Nagari 2. Peningkatan Realisasi PBB 100% 3. Penataan perencanaan pembangunan Nagari
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	1. Pembangunan MDA 2. Pembangunan Sarana Air Minum 3. Pembangunan Lapangan Bola Voly
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1. Pembinaan Lembaga Nagari
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1. Terpilihnya Nagari Lunang Tiga Pemenang Lomba Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Propinsi Sumatera Barat No 3. 2. Terpilihnya Nagari Lunang Tiga Pemenang Lomba Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan No 1. 3. Pemberdayaan Kelompok Kader, Guru dan Lembaga Nagari.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa keberhasilan yang dicapai selama kurang waktu satu tahun berjalan mencakup 4 (Empat) Bidang kewenangan Nagari yang meliputi berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018, namun demikian tabel diatas di uraikan secara singkat dan oleh karena itu untuk melihat aspek kemajuan / keberhasilan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah sebagaimana terlampir

B. TUJUAN

Laporan keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari ini bertujuan untuk mengevaluasi diri sampai sejauh mana keberhasilan yang kita capai serta meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Nagari, dan sebagai koreksi atas keberhasilan yang diperoleh dalam satu tahun anggaran ini yaitu tahun anggaran 2018 apabila hasil yang dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya tentu dapat untuk pijakan di tahun - tahun yang akan datang bagi Pemerintahan Nagari Lunang Tiga, akan tetapi bila dirasa kurang baik sebagai koreksi diri dan menentukan langkah yang lebih baik.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan atas permendagri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 sebagaimana telah diubah ke Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Nagari , Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2016. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 786);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1099);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2);

II. KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERATURAN NAGARI

Dalam UU Nagari Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 74 “Belanja Nagari diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Nagari. Ini juga sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2018, diawali dengan proses perencanaan bersama dengan masyarakat. Mulai dari penyusunan dan penetapan RKP Nagari sampai dengan penyusunan APBNagari Lunang Tiga yang ditetapkan melalui peraturan Nagari.

Pada prosesnya, penyusunan, penetapan sampai pada pelaksanaannya, pemerintah Nagari Lunang Tiga melibatkan unsur masyarakat. Baik langsung maupun terwakili oleh Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) sebagai representatsi dari masyarakat Nagari Lunang Tiga.

A. PERATURAN NAGARI TENTANG APBNagari

Penyelenggaraan kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari didanai oleh APBNagari. Selain itu kewenangan Lokal Nagari juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah.

Mengacu pada PP 47 2015 Pasal 100 APBNagari dipergunakan oleh Nagari dengan ketentuan 70 % dari jumlah anggaran belanja Nagari digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari. Paling banyak 30% untuk pendanaan

1. penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan perangkat Nagari;
2. operasional pemerintahan Nagari;
3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Nagari; dan
4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Untuk menggambarkan Pendapatan, Pembiayaan, target dan realisasi ABPNagari pemerintah Nagari Lunang Tiga pada tahun 2018, silahkan dicermati uraian dibawah ini :

Anggaran pendapatan dan belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1.	Pendapatan Nagari	Rp.	1.220.594.100,00
	a. Pendapatan Asli Nagari	Rp.	6.500.000,00
	b. Alokasi Dana Desa	Rp.	401.135.200,00
	c. Dana Desa	Rp.	672.617.000,00
	d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp.	40.341.900,00
	e. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	Rp.	100.000.000,00
2.	Belanja Nagari	Rp.	1.210.995.807,28
	a. Bidang penyelenggaraan Pemerintah	Rp.	445.658.810,13
	b. Bidang Pembangunan	Rp.	549.985.058,00
	c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	12.274.835,00
	d. Bidang pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp.	203.077.104,15
	Surplus/Defisit	Rp.	9.598.292,72
3.	Pembiayaan Nagari	Rp.	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	10.401.707,28
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	20.000.000,00
	Selisih Pembiayaan	Rp.	(9.598.292,72)

Untuk rincian Anggaran pendapatan dan belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan Nagari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, kami lampirkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari (LKPPN) ini.

Realisasi, target dan persentase Anggaran pendapatan dan belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran		Realisasi		%
I.	Pendapatan					
I.a	Pendapatan Asli Nagari	Rp.	5.000.000,00	Rp.	5.000.000,00	100
I.b	Lain - Lain Pendapatan Asli Nagari	Rp.	1.500.000,00	Rp.	948.734,00	63,25
I.c	Pendapatan Transfer	Rp.	1.214.094.100,00	Rp.	1.155.492.643,00	95,17
-	ADD	Rp.	401.135.200,00	Rp.	401.135.200,00	100
-	DD	Rp.	672.617.000,00	Rp.	672.617.000,00	100
-	PBH	Rp.	40.341.900,00	Rp.	31.740.443,00	78,68
-	PBK	Rp.	100.000.000,00	Rp.	50.000.000,00	50
II.	Belanja Nagari					
I	Bidang Pemerintahan	Rp.	445.658.810,13	Rp.	430.460.900,00	96,59
-	Penghasilan tetap Wali & Perangkat	Rp.	165.600.000,00	Rp.	165.600.000,00	100
-	Tunjangan Wali Dan Perangkat	Rp.	78.150.000,00	Rp.	78.150.000,00	100
-	Tunjangan BPJS Wali & Perangkat	Rp.	6.510.000,00	Rp.	3.791.800,00	58,25
-	Tunjangan BAMUS	Rp.	58.200.000,00	Rp.	58.200.000,00	100
-	Kegiatan Operasional Perkantoran	Rp.	47.246.357,00	Rp.	43.716.500,00	100
-	Operasional BAMUS	Rp.	18.144.461,00	Rp.	16.223.300,00	89,41
-	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah	Rp.	8.250.000,00	Rp.	8.250.000,00	100
-	Kegiatan Perencanaan Pembangunan	Rp.	11.921.840,13	Rp.	5.095.300,00	42,74
-	Kegiatan Pengadaan Peralatan & Perlengkapan	Rp.	8.460.000,00	Rp.	8.460.000,00	100
-	Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor	Rp.	5.640.000,00	Rp.	5.640.000,00	100
-	Kegiatan Operasional Raskin	Rp.	2.100.000,00	Rp.	2.100.000,00	100
-	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan PBB	Rp.	4.904.000,00	Rp.	4.904.000,00	100
-	Kegiatan Pemilihan Wali Nagari	Rp.	19.052.152,00	Rp.	18.850.000,00	98,94
-	Kegiatan Pengelolaan Keuangan & Aset	Rp.	9.500.000,00	Rp.	9.500.000,00	100
-	Operasional Linmas Nagari	Rp.	1.980.000,00	Rp.	1.980.000,00	100
II	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	549.985.058,00	Rp.	449.902.700,00	81,80
-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Rp.	81.072.624,00	Rp.	81.053.100,00	99,98
-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Rp.	152.487.810,00	Rp.	152.444.500,00	99,97
-	Pengadaan Sarana Taman Bacaan Masyarakat	Rp.	16.832.000,00	Rp.	16.832.000,00	100
-	Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Rp.	17.518.000,00	Rp.	17.518.000,00	100
-	Pemeliharaan Sarana-Prasana Masyarakat	Rp.	13.830.000,00	Rp.	13.830.000,00	100
-	Pembangunan Sarana Air Bersih	Rp.	45.288.000,00	Rp.	45.288.000,00	100
-	Pembangunan Jembatan	Rp.	18.000.000,00	Rp.	18.000.000,00	100
-	Pembangunan Ekonomi Produktif	Rp.	74.956.624,00	Rp.	74.937.100,00	99,97
-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rp.	100.000.000,00	Rp.	0,00	0
-	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Rp.	30.000.000,00	Rp.	30.000.000,00	100
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	12.274.835,00	Rp.	7.724.600,00	62,93
-	Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	Rp.	7.774.835,00	Rp.	7.724.600,00	99,35
-	Pembinaan Lembaga Adat	Rp.	2.500.000,00	Rp.	0,00	0
-	Pembinaan LPMN	Rp.	2.000.000,00	Rp.	0,00	0
IV.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	203.077.104,15	Rp.	202.612.400,00	99,77
-	Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	Rp.	40.648.000,00	Rp.	40.648.000,00	100
-	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Rp.	6.400.384,15	Rp.	6.400.000,00	99,99
-	Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB, PMT	Rp.	14.460.000,00	Rp.	14.460.000,00	100
-	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Rp.	13.825.000,00	Rp.	13.803.000,00	99,84
-	Pemberdayaan TP-PKK Nagari	Rp.	12.410.000,00	Rp.	12.010.000,00	96,78
-	Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Rp.	80.525.000,00	Rp.	80.525.000,00	100
-	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Rp.	10.771.000,00	Rp.	10.771.000,00	100
-	Penyusunan Profil Desa / Data Desa	Rp.	8.819.000,00	Rp.	8.819.000,00	100
-	Pemasyarakatan Olahraga	Rp.	15.218.720,00	Rp.	15.176.400,00	99,72
	Jumlah Biaya	Rp.	1.210.995.807,28	Rp.	1.090.700.600,00	90,07
	Jumlah Deposit	Rp.	9.598.292,72	Rp.	70.740.777,00	73,01

Untuk melihat rincian pembelanjaan, penganggaran terhadap kegiatan dan realisasi serta persentase keberhasilan kegiatan maka kami lampirkan dokument penjabaran realisasi yang merujuk pada Peraturan Nagari Lunang Tiga no 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2018, sebagaimana terlampir pada bagian yang tak terpisahkan dari LKPPN ini.

B. PERATURAN NAGARI TENTANG PUNGUTAN NAGARI

Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan, tentu memiliki kewenangan yang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam rangka untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Nagari. Dengan dasar itu maka menyusun dan mengatur program terencana yang dituangkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Seiring dengan itu, pemerintah Nagari menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari harus memiliki Pendapatan yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nagari.

Adapun Pungutan - Pungutan Nagari yang dianggap sah sesuai dengan Peraturan Nagari Lunang Tiga nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Nagari dan Peraturan Wali Nagari Lunang Tiga Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Peraturan wali Nagari Nomor 4 Tahun 2018.

1. Sewa Tanah Vasilitas Umum Nagari
2. Sewa Los dan Ruko Nagari
3. Surat keterangan Jual beli/potongan Hewan
4. Surat Keterangan Asal Usul Barang
5. Surat pengantar izin keramaian

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengacu pada Premendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Nagari, pada pasal 3 poin 1 *“Laporan penyelenggaraan pemerintah Nagari Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran”*.

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Nagari. Maka kami menyampaikan hal - hal pokok kesimpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Nagari Lunang Tiga
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Nagari Lunang Tiga tahun anggaran 2018 berdasarkan APBNagari
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Nagari Lunang Tiga.

B. SARAN

1. Seiring dengan keinginan pemerintah dalam hal ini Perangkat Nagari, menginginkan Nagari cermat dan cepat dalam penyerapan Anggaran. Oleh karena itu kami menyarankan agar pemerintah kabupaten tidak lambat dalam hal penetapan pagu anggaran, agar Nagari bisa cepat menyelesaikan perancangan seluruh kegiatan pembangunan untuk tahun berikutnya.

2. Pada tahun ini program perencanaan kami tidak terealisasi 100%, itu disebabkan adanya keterlambatan pencairan dan tidak terealisasinya anggaran sesuai pagu yang dikeluarkan pemerintah kabupaten terkhusus pajak dan retribusi kabupaten. Berdasarkan pagu, kami menyarankan agar penetapan serta realisasi pagu yang sesuai.

Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Akhir Tahun Anggaran 2018 ini dibuat untuk digunakan sebagai bahan evaluasi.

Lunang Tiga, 15 Maret 2019
WALI NAGARI LUNANG TIGA



M. SOBIRIN, SH